



# EDUKASI KONSUMEN

Edisi September 2020

[sikapluangmu.ojk.go.id](http://sikapluangmu.ojk.go.id)

## STIMULUS LANJUTAN OJK UNTUK SEKTOR PERBANKAN DAN IKNB

**KON  
TAK  
GO**



# KOINKU 2020

“ PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN  
MELALUI PROGRAM INKLUSI KEUANGAN ”

Anda memiliki ide kreatif  
terkait Model Inklusi Keuangan Perempuan?

**SEGERA DAFTAR & IKUTI KOINKU**

*\*Info Pendaftaran melalui Website*

*www.koinku.co.id/pendaftaran*

*\*Acara ini tidak dipungut biaya*

## PERSYARATAN

1. Peserta merupakan kelompok ( 2 - 3 orang )
2. Model inklusi keuangan yang dikirimkan dalam bentuk proposal ( Format PDF ) maks. 18 hal dan tayangan PPT maks. 8 slides
3. Peserta mengikuti seluruh rangkaian kompetisi

TOTAL HADIAH

80  
JUTA

\*PAJAK DITANGGUNG PEMENANG

BATAS PENGIRIMAN PROPOSAL  
30 september 2020

## tahapan koinku 2020



# Menepis Badai Agar Segera Berlalu

Memasuki kuartal 3 tahun 2020, badai yang ditimbulkan pandemi Covid-19 belum tampak mereda. Meski berbagai pelonggaran telah diberlakukan, namun situasi masih jauh dari pulih. Dalam situasi seperti ini, pada 20 Agustus lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali meluncurkan Paket Kebijakan Lanjutan Stimulus Covid-19, untuk menepis dampak pandemi lebih jauh dan membuat perekonomian terus menggeliat serta mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional.

Penerbitan kebijakan stimulus lanjutan ini merupakan tindak lanjut dari hasil asesmen yang dilakukan OJK dalam Rapat Dewan Komisiner pada 20 Agustus 2020. Rapat mencermati dampak pandemi Covid-19 telah menekan sektor jasa keuangan meski stabilitas tetap terjaga dengan kinerja intermediasi masih positif dan profil risiko tetap terkendali. Kebijakan stimulus ini bertujuan meningkatkan likuiditas dan permodalan Perbankan serta memberikan relaksasi kepada Lembaga Keuangan Mikro dan Perusahaan Perasuransian.

Paket ini meliputi Kebijakan Relaksasi untuk Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah serta Kebijakan Relaksasi untuk Bank Perkreditan Rakyat

(BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Rincian mengenai paket ini dapat Anda simak pada rubrik Sorotan Utama edisi ini.

Pada pertemuan virtual dengan pelaku Industri Jasa Keuangan bersamaan dengan pengumuman Paket Kebijakan Lanjutan Stimulus Covid-19 ini Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso mengajak segenap unsur lembaga jasa keuangan, pemangku kepentingan, dan regulator untuk bersinergi mengantisipasi serta menjaga sentimen positif.

Pada edisi ini kami juga menyajikan berbagai tulisan terkait masalah aktual yang dihadapi industri jasa keuangan dari berbagai aspek. Redaksi juga menampilkan sebuah perusahaan rintisan (*start-up company*) yang jeli mengubah strategi sehingga dapat terus tumbuh pesat di saat pandemi – bahkan meraih kepercayaan banyak investor internasional. Hikmah yang dapat dipetik dari perusahaan rintisan ini adalah selalu ada jalan jika kita mau berusaha, siap bermanuver, dan jeli meraih peluang. Selamat membaca.



Dewan Pelindung: **WIMBOH SANTOSO**  
(Ketua Dewan Komisiner OJK)

Dewan Penasehat: **TIRTA SEGARA**  
(Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen),  
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:  
**SARJITO** (Deputi Komisiner Edukasi dan Perlindungan Konsumen)

Redaktur Ahli: **KRISTRIANTI PUJI RAHAYU** (Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan), **AGUS FAJRI ZAM** (Kepala Departemen Perlindungan Konsumen), **HORAS V.M. TARIHORAN** (Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan), **RELA GINTING** (Direktur Penelitian Kebijakan dan Pengaturan EPK), **EDWIN NURHADI** (Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan), **BERNARD WIDJAJA** (Direktur Market Conduct) **SABAR WAHYONO** (Direktur Pelayanan Konsumen), **TRI HERDIANTO** (Direktur Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen)

Redaktur: **ANUGRAH SUTEJO**  
(Kepala Bagian Informasi)

Redaksi: Anggota Tim Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan

Alamat Redaksi: Bidang Edukasi & Perlindungan Konsumen OJK Menara Radius Prawiro Lantai 2, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta Pusat 10350  
Telepon: (021) 29600000 Faksimili: (021) 3866032 Website: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

Majalah Edukasi Konsumen dapat diunduh pada minisite OJK: [sikapiuangmu.ojk.go.id](http://sikapiuangmu.ojk.go.id)

Redaksi menerima kiriman naskah dan berhak mengedit naskah tanpa menghilangkan intisari dari artikel sebelum dipublikasikan

# 05 SOROTAN UTAMA

## STIMULUS LANJUTAN PENANGKAL DAMPAK PANDEMI BERKEPANJANGAN

Pada Agustus 2020 lalu, OJK kembali meluncurkan sejumlah stimulus lanjutan untuk menangkal dampak Pandemi Covid-19 yang masih terus berlanjut. Apa saja stimulus lanjutan ini? Apa tujuannya, dan bagaimana dampaknya?



# 12 FOKUS PASAR MODAL

## Reksa Dana Syariah Berpotensi Tumbuh di Tengah Pandemi

Pangsa pasar dana syariah terhadap industri reksa dana nasional terus meningkat. Berdasarkan data OJK, pada Juni 2020, *market share* dana kelolaan reksa dana syariah mencapai 12,03% terhadap total dana kelolaan industri reksa dana nasional.



### 48 WACANA

Tetap Bertahan di Kala Pandemi, UMKM Perlu Digitalisasi

### 50 ARTIKEL

Aman Bersepeda di Tengah Pandemi

# 36

### INSPIRASI

## Bambang Brodjonegoro Penggagas Tax Amnesty 2016 & Realisator KNKS

Bambang Brodjonegoro, sosok inspiratif yang merupakan salah satu ekonom ternama Indonesia. Beliau merupakan sosok dibalik kebijakan Tax Amnesty dan terealisasinya pendirian Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).



### 10 PERSPEKTIF

Pertumbuhan Perekonomian Indonesia di Tengah Prediksi Ekonomi Bank Dunia

### 14 FOKUS PERBANKAN

Menjaga Aset Selama Pandemi Kunci Utama Menjaga Likuiditas

### 16 FOKUS GLOBAL

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Global

### 18 INFO PASAR MODAL

Era *New Normal* Kinerja Pasar Modal Pulih

### 20 INFO PERBANKAN

OJK Jaga Kestabilan BPR dengan Apex

### 21 INFO PERBANKAN

Waspada Informasi *Hoax* Ajakan Menarik Dana di Bank

### 22 INFO IKNB

Prospek Industri Dana Pensiun Memasuki Era *New Normal*

### 24 INFO IKNB

Strategi OJK Mengakselerasi Relaksasi Kredit Lembaga Pembiayaan

### 26 REGULASI

Kebijakan Stimulus OJK selama Pandemi

### 27 REGULASI

OJK Keluarkan 5 Peraturan Tindak Lanjuti Perppu No 1/2020

### 28 BISNIS PEMULA

Kopi dengan Cita Rasa Lokal Incaran Investor Asing

### 30 INVESTASI

Satgas Waspada Investasi Terus Perkuat Koordinasi dengan POLRI

### 32 TELAHAH PRODUK

Rumah Privat Menggali Peluang di Tengah Pandemi

### 34 KONSUMEN BICARA

Pilih Pilih Asuransi yang Tepat di Tengah Pandemi

### 38 TOKOH

**BAHLIL LAHADALIA**  
Mantan Kondektur yang Menjadi Kepala BKPM

### 40 WAWASAN PERBANKAN

Mengenal (Kembali) *Digital Banking*

### 41 WAWASAN IKNB

OJK Sesuaikan PAYDI di Saat Pandemi

### 42 WAWASAN PASAR MODAL

IHSG Menunjukkan Tren Positif tapi Tetap Harus Waspada

### 43 KABAR OTORITAS

Kinerja OJK Pulihkan Ekonomi Nasional

### 44 KABAR OTORITAS

5 Strategi OJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan

### 46 ANGKA BICARA

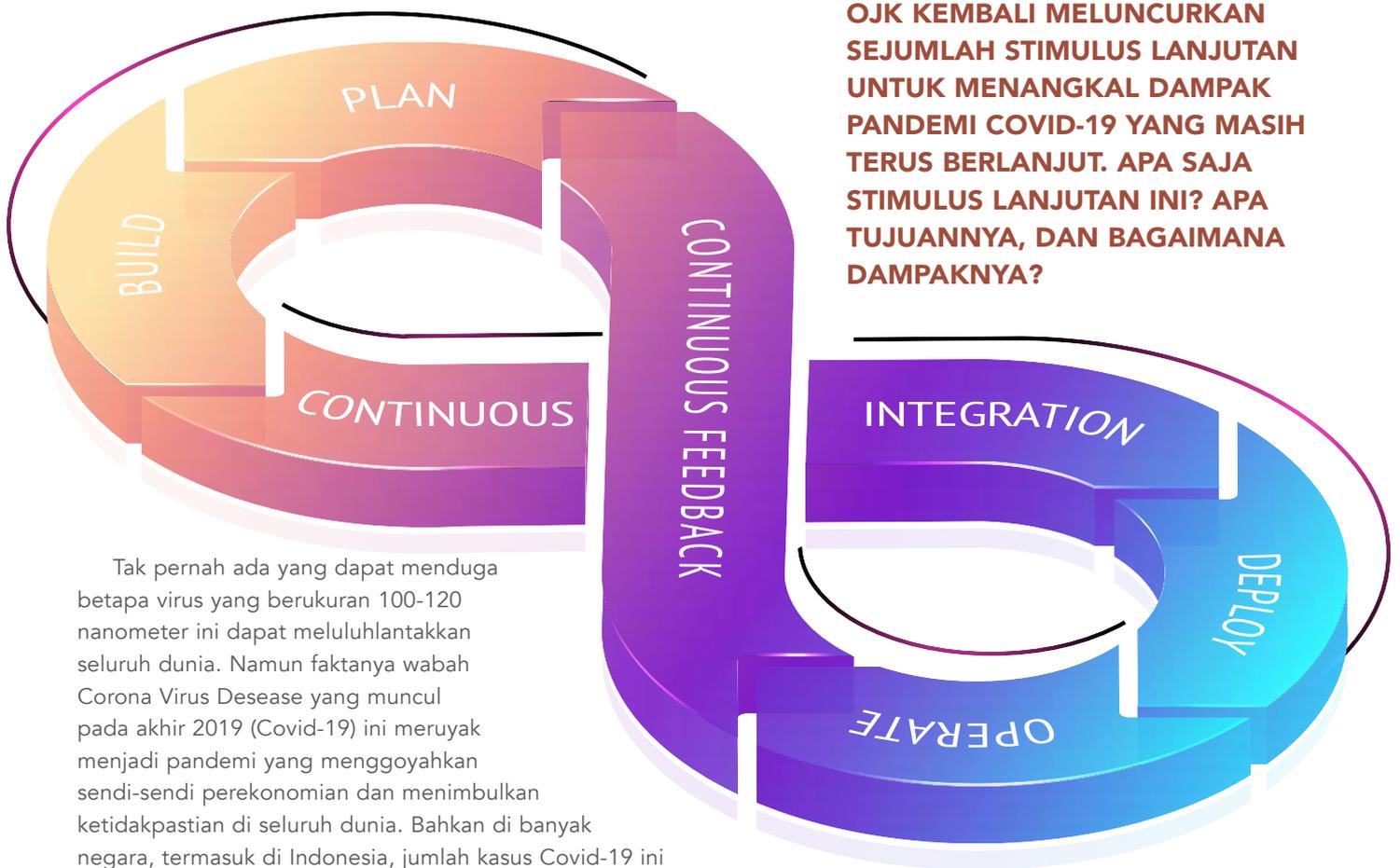
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal II/2020 Mulai Stabil

### 47 INSIGHT

Apa yang Didahulukan di Tengah Pandemi, Dana Darurat atau Investasi?

# Stimulus Lanjutan Penangkal Dampak Pandemi Berkepanjangan

**PADA AGUSTUS 2020 LALU, OJK KEMBALI MELUNCURKAN SEJUMLAH STIMULUS LANJUTAN UNTUK MENANGKAL DAMPAK PANDEMI COVID-19 YANG MASIH TERUS BERLANJUT. APA SAJA STIMULUS LANJUTAN INI? APA TUJUANNYA, DAN BAGAIMANA DAMPAKNYA?**



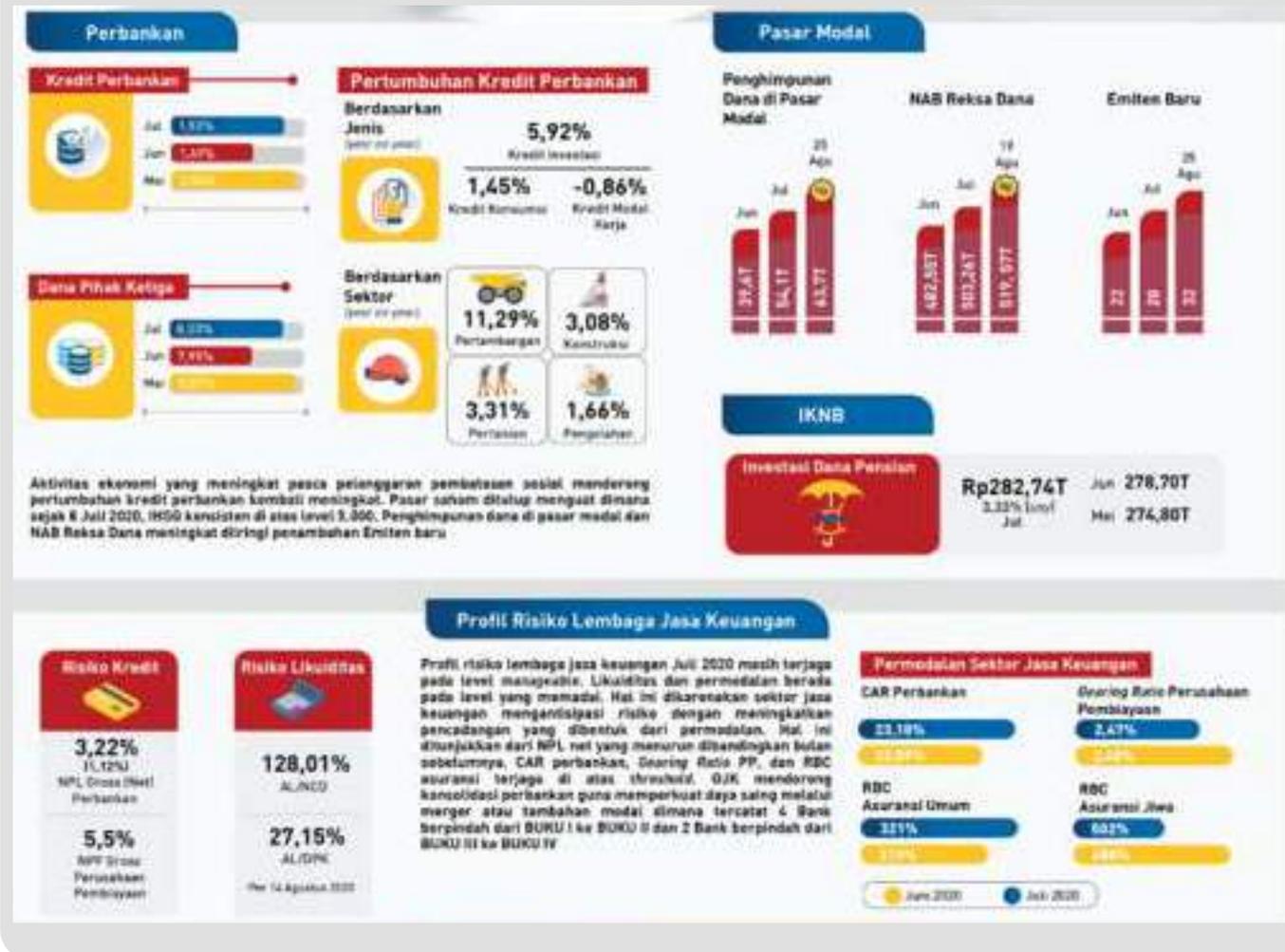
Tak pernah ada yang dapat menduga betapa virus yang berukuran 100-120 nanometer ini dapat meluluhlantakkan seluruh dunia. Namun faktanya wabah Corona Virus Disease yang muncul pada akhir 2019 (Covid-19) ini meruyak menjadi pandemi yang menggoyahkan sendi-sendi perekonomian dan menimbulkan ketidakpastian di seluruh dunia. Bahkan di banyak negara, termasuk di Indonesia, jumlah kasus Covid-19 ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda, bahkan masih terus meningkat.

Menghadapi situasi ini, OJK kembali mengeluarkan sejumlah kebijakan lanjutan dengan merelaksasi ketentuan di sektor perbankan untuk lebih memberikan ruang aspek likuiditas dan permodalan perbankan sehingga stabilitas

sektor keuangan tetap terjaga di tengah pelemahan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19.

Penerbitan kebijakan stimulus lanjutan ini merupakan tindak lanjut hasil asesmen OJK dalam Rapat Dewan Komisiner pada 20 Agustus 2020. Sebelumnya, OJK

### ASESMEN SEKTOR JASA KEUANGAN



juga telah menerbitkan kebijakan stimulus lanjutan berdasarkan asesmen OJK dalam Rapat Dewan Komisioner pada 28 Mei 2020. Penerbitan kedua kebijakan stimulus lanjutan ini mengacu kepada dua Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dan POJK Nomor 14 /POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-bank.

Rapat Dewan Komisaris ini mencermati dampak pandemi Covid-19 cenderung menurunkan aktivitas perekonomian dan melemahkan sektor riil sehingga akhirnya mengimbas sektor keuangan, meski kondisi stabilitasnya tetap terjaga dengan kinerja intermediasi yang positif dan profil risiko tetap terkendali. Kebijakan stimulus lanjutan ini diharapkan

mampu meningkatkan likuiditas dan permodalan Perbankan serta memberikan relaksasi kepada Lembaga Keuangan Mikro dan Perusahaan Perasuransian.

Fakta di lapangan memang menunjukkan kinerja sejumlah lembaga keuangan menurun. Pada semester I-2020 bank-bank BUMN masih mencatat laba bersih, namun secara tahunan (y.o.y.) menurun dibandingkan kinerja Januari-Juni 2019. Pasalnya, sejumlah debitur yang terdampak

pandemi Covid-19 menunda pembayaran pokok dan bunga pinjaman mereka.

Bank-bank swasta, juga mengalami kondisi yang sama. Alhasil, semua bank terpaksa menyesuaikan rencana bisnisnya dengan kondisi terkini. Bank-bank harus merevisi pertumbuhan kredit dari dua digit menjadi 4-5%, karena dalam situasi penuh ketidakpastian ini, jika ingin selamat, semua usaha – termasuk sektor bank dan non-bank – harus dikelola secara lebih konservatif.

Harus diakui, salah satu penyebab turunnya laba bersih ini adalah berkurangnya pendapatan bunga akibat penerapan stimulus restrukturisasi kredit terhadap pandemi Covid-19. Hingga 31 Juli 2020 restrukturisasi kredit yang dikurkuran salah satu bank BUMN untuk membantu agar Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dari terpaan pandemi mencapai Rp 183,7 triliun untuk 2,9

juta debitur. Namun manajemen bank pun menyadari benar, jika ingin selamat mengarungi masa krisis ini, bank pun harus mau dan mampu menyelamatkan dan membantu kebangkitan para nasabah debitornya – terutama UMKM yang paling terimbas dampak pandemi ini – sehingga dapat sama-sama bahu-membahu melalui krisis ini.

OJK bersinergi dengan Pemerintah, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjaminan Simpanan, mengantisipasi tekanan perekonomian akibat pandemi Covid-19. Asesmen Rapat Dewan Komisioner pada Agustus 2020 mencatat kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) menunjukkan hasil optimalisasi berbagai kebijakan untuk memulai pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan peran sektor jasa keuangan (sisi *supply*) yang memberikan stimulus geraknya perekonomian (sisi *demand*) sebagaimana terlihat pada infografis

Asesmen Jasa Keuangan (lihat Infografis).

Dari infografis tersebut terlihat jelas bagaimana aktivitas ekonomi yang meningkat pasca pelonggaran pembatasan sosial mendorong pertumbuhan kredit perbankan kembali meningkat. Kredit perbankan yang pada Mei 2020 berada di angka 3,04%, pada Juni sempat jatuh menjadi 1,49%, namun pada Juli telah kembali naik menjadi 1,53%. Dana pihak ketiga yang pada Mei 2020 bersinar di angka 8,87% sempat terpeleset ke angka 7,95% pada Juni 2020, dan naik kembali menjadi 8,53% pada Juli 2020. Dengan relaksasi lanjutan yang diluncurkan pada Agustus lalu, diharapkan angka ini dapat terus bergerak naik.

Pasar saham pun terus menguat. Sejak Juli 2020, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) konsisten di atas level 5.000. Penghimpunan dana di Pasar Modal dan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa dana meningkat diiringi

## PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN PERIZINAN TERINTEGRASI SEKTOR JASA KEUANGAN





penambahan emiten baru. Pada 25 Agustus lalu penghimpunan dana mencapai Rp 63,7 triliun, dan emiten baru menjadi 32. Sementara pada 19 Agustus 2020 NAB Reksa dana mencapai Rp 519,57 triliun. IHSG ini sempat turun drastis akibat sentimen pasar yang terkejut mendengar keputusan Pemerintah Daerah DKI yang kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat pada pertengahan September lalu. Namun syukurlah situasi ini segera pulih beberapa hari kemudian setelah kebijakan tersebut direvisi dan diharapkan segera kembali menembus angka 5.000.

Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) juga menunjukkan perkembangan menggembirakan. Investasi Dana Pensiun, misalnya, pada Mei 2020 sempat berada di angka Rp 274,80 triliun, namun terus bergerak naik. Pada Juni 2020 angkanya telah menjadi Rp 378,70 triliun, dan pada Juli 2020 menjadi Rp 283,76 triliun – naik 3,33% dibandingkan angka 2019 (y.o.y.).

Asesmen Rapat Dewan Komisaris juga menilai Profil Risiko Lembaga Jasa Keuangan per Juli 2020 masih terjaga pada level terkendali (*manageable*). Likuiditas dan permodalan berada pada level yang memadai. Hal ini karena sektor jasa keuangan mengantisipasi risiko dengan meningkatkan pencadangan yang dibentuk dari permodalan. Hal ini terlihat dari kredit macet (*Non-Performing Loan/NPL*) bersih yang turun dibandingkan pada bulan sebelumnya. Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) Perbankan, *Gearing Ratio* (rasio jumlah pinjaman dibandingkan modal sendiri perusahaan), Peraturan Pemerintah (PP), dan *Risk Based Capital* (RBC) Asuransi terjaga di atas nilai ambang batas (*threshold*). OJK juga mendorong konsolidasi perbankan guna memperkuat daya saing melalui merger atau tambahan modal sehingga dapat memperkuat struktur fundamental bank tersebut.

Berbagai indikator kinerja industri jasa keuangan ini cukup menggembirakan. Kita telah melangkah di jalan yang benar, meski harus tetap berhati-hati agar tidak tergelincir. OJK sangat berharap penanganan Covid-19 dapat segera mewujudkan aktivitas kenormalan baru (*the new normal*) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga OJK dapat mengukur dan memitigasi risiko likuiditas dan kecukupan permodalan industri jasa keuangan.

Dalam pertemuan virtual dengan Industri Jasa Keuangan, Ketua Dewan Komisaris OJK Wimboh Santoso mengajak segenap unsur lembaga jasa keuangan, pemangku kepentingan dan regulator bersinergi mengantisipasi serta menjaga sentimen positif. Dengan kerja keras kita semua, tentunya diiringi panjatan doa yang tiada putusnya, kita sama-sama berharap agar perekonomian Indonesia dapat segera pulih dan melesat kembali. Semoga.

# Stimulus Lanjutan OJK untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan membuat upaya pemulihan ekonomi nasional masih harus berlanjut. Untuk itu OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK 03/2020/POJK (Stimulus Covid-19). Penerbitan kebijakan stimulus lanjutan ini merupakan tindak lanjut dari hasil asesmen yang dilakukan OJK dalam Rapat Dewan Komisiner pada 28 Mei 2020 dan 20 Agustus 2020 yang mencermati dampak pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan terhadap sektor jasa keuangan, meski kondisi stabilitasnya tetap terjaga dengan kinerja intermediasi yang positif dan profil risiko tetap terkendali. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan likuiditas dan permodalan Perbankan, serta memberikan relaksasi kepada Lembaga Keuangan Mikro dan Perusahaan Perasuransian.

Hasil implementasi kebijakan ini terlihat pada infografis Kinerja Intermediasi Sektor Jasa Keuangan di halaman ini. Dari infografis ini terlihat, bahwa berkat stimulus lanjutan ini, Lembaga Jasa Keuangan mampu menjaga profil risiko pada level yang terkendali. Begitu pula, permodalan

Lembaga Jasa Keuangan terjaga stabil pada level yang tinggi.

Untuk memitigasi Dampak Pandemi Covid-19, Pemerintah, BI, dan OJK, mengeluarkan berbagai kebijakan baik dari sisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan. OJK telah menerbitkan 11 POJK untuk memitigasi dampak Covid-19 dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Salah satu kebijakan yang diterbitkan terkait restrukturisasi kredit/pembiayaan (Penerbitan POJK 11/2020 dan POJK 14/2020) yang mengatur pedoman restrukturisasi kredit/pembiayaan.

Peran restrukturisasi ini sangat besar dalam menekan tingkat kredit macet (NPL) dan permodalan bank sehingga stabilitas sektor jasa keuangan dapat terjaga dengan baik.

Dalam realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional, berbagai stimulus yang diberikan pemerintah, seperti penempatan dana pemerintah di industri perbankan dan penjaminan kredit UMKM dan korporasi, dapat mendorong penyaluran kredit lebih tinggi lagi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Selain memberikan berbagai kebijakan stimulus, OJK juga

terus memperkuat pengawasan terintegrasi. Pengawasan Terintegrasi telah memperkuat pengawasan konglomerasi keuangan yang menawarkan produk keuangan hybrid antara produk perbankan, asuransi, dan investasi. Pengawasan terintegrasi mendeteksi risiko stabilitas sektor jasa keuangan, OJK telah menerbitkan peraturan dan infrastruktur pengawasan terintegrasi. Di bidang Pengaturan Pengawasan OJK telah menerbitkan Manajemen Risiko Terintegrasi (POJK Nomor 17/2014), Tata Kelola terintegrasi (POJK Nomor 18/2014), dan Permodalan Terintegrasi (POJK Nomor 26/2015). Berdasarkan Pengawasan Terintegrasi itu ada 48 konglomerasi keuangan dengan total nilai aset Rp 7.187 triliun.

Di bidang Pengawasan Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan, OJK juga telah mengembangkan infrastruktur perizinan terintegrasi untuk mendukung proses pengawasan terintegrasi. Infrastruktur tersebut antara lain melalui Optimalisasi Sistem Perizinan dan Regulasi Terintegrasi (SPRINT), Business process Re-engineering (BPR) Perizinan Terintegrasi, dan Implementasi Digital Signature pada Perizinan Terintegrasi.

## PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19, Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan berbagai kebijakan baik dari sisi fiskal, moneter dan sektor keuangan. OJK telah menerbitkan 11 POJK untuk memitigasi dampak Covid-19 dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Salah satu kebijakan yang diterbitkan terkait restrukturisasi kredit/pembiayaan (Penerbitan POJK 11/2020 dan POJK 14/2020) yang mengatur pedoman restrukturisasi kredit/pembiayaan.

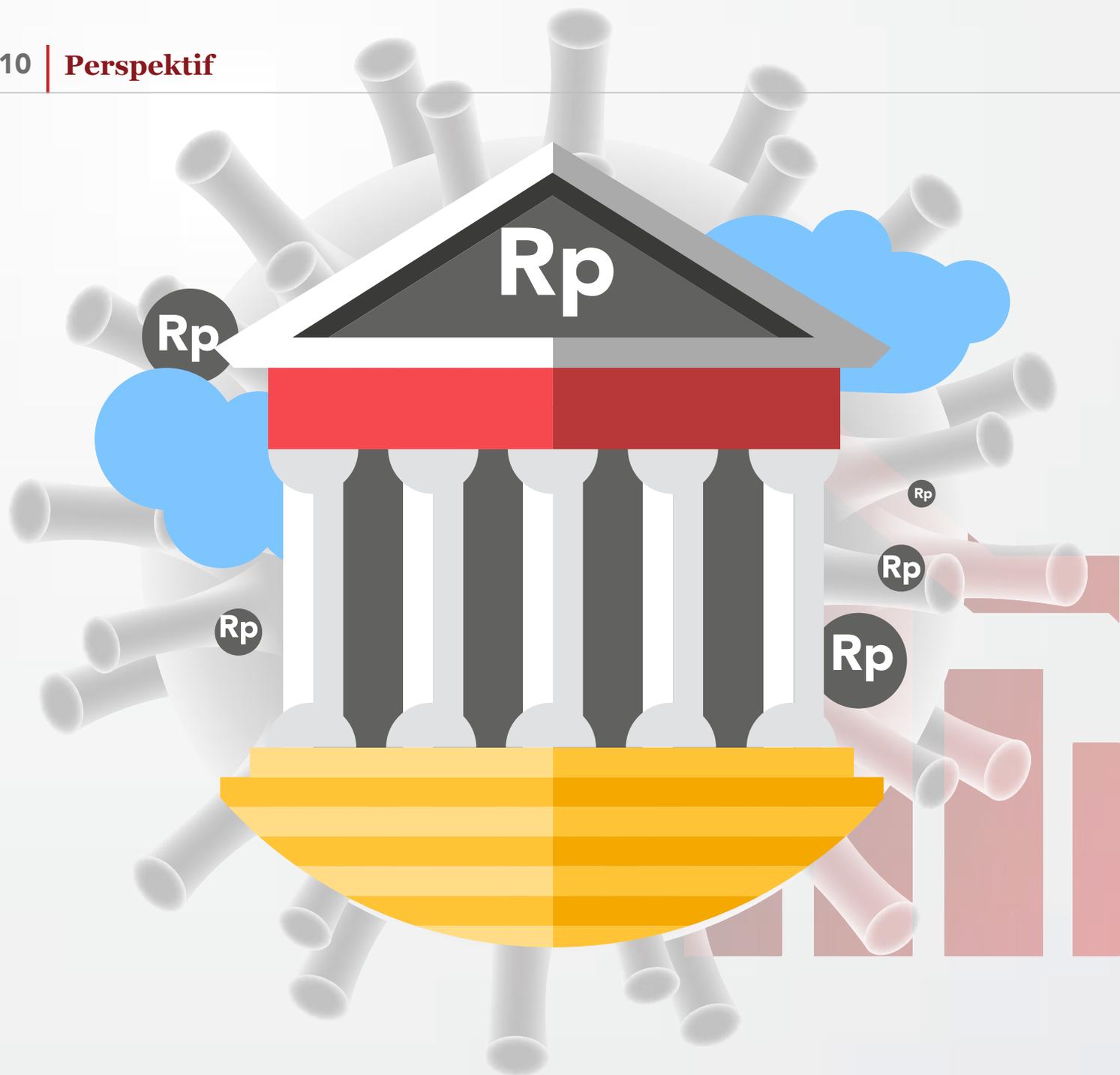
### Realisasi Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan



Peran restrukturisasi sangat besar dalam menekan tingkat NPL dan permodalan Bank sehingga stabilitas sektor jasa keuangan dapat terjaga dengan baik.

### Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional





# Pertumbuhan Perekonomian Indonesia di Tengah Prediksi Ekonomi Bank Dunia

**Kondisi perekonomian yang porak-poranda akibat pandemi Covid-19 melanda hampir seluruh negara di dunia. Bank Dunia pun memprediksikan sejumlah negara bakal terancam resesi, termasuk Indonesia.**

Bank Dunia merilis proyeksi terbaru mengenai prospek perekonomian Indonesia. Pada 2020, lembaga yang berkantor pusat di Washington DC, Amerika Serikat, tersebut memperkirakan ekonomi Indonesia tidak tumbuh alias 0%. "Kami perkirakan pertumbuhan ekonomi akan melambat ke nol persen. Asumsi ini berdasarkan dua bulan implementasi dari PSBB yang efektif mulai April



hingga Mei bahkan sampai Juni," kata salah seorang ekonom senior Bank Dunia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pertumbuhan investasi turut melambat akibat ketidakpastian berakhirnya wabah korona serta penanganan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Lalu, harga komoditas rendah, dan ekonomi global masih memengaruhi pasar keuangan dan saham. "Konsumsi akan melambat karena terjadinya PHK dihasilkan dari penurunan kegiatan ekonomi dan menurunnya kepercayaan konsumen," ujarnya.

Bahkan menurut data Bank Dunia, rasio utang Indonesia sudah berada di level 37% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dikarenakan defisit lebih tinggi, pertumbuhan lebih lambat, depresiasi nilai tukar rupiah, guncangan suku bunga, serta banyaknya pinjaman untuk membiayai paket stimulus.

Kondisi demikian bisa mendorong Indonesia masuk jurang resesi seperti yang sudah dialami 12 negara yakni Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Italia, Korea Selatan, Jepang, Hongkong, Singapura, Filipina, Polandia, dan Malaysia. Kekhawatiran Bank Dunia memang cukup beralasan mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pandemi mengalami dua kali revisi prediksi dari minus 0,4% sampai 2,3% menjadi minus 0,4% sampai 1%. Lantas, apakah Indonesia juga akan masuk dalam daftar negara-negara yang mengalami resesi tersebut?

Indonesia masih bisa lolos dengan tiga skenario yang disiapkan Bank Dunia. Pertama, apabila pertumbuhan ekonomi global turun sampai dengan minus 5,2% di tahun ini, maka perekonomian Indonesia juga akan naik. Kedua, apabila perekonomian Indonesia bisa dibuka kembali sepenuhnya pada Agustus. Bila roda perekonomian bergerak kembali meski perlahan, besar kemungkinan Indonesia bisa terhindar dari resesi. Ketiga, apabila tidak ada gelombang infeksi lanjutan dari pandemi ini. Terkait hal ini, seluruh jajaran tim gugus tugas Covid-19 hingga saat ini masih terus berupaya mengendalikan laju penyebaran virus. Ditambah lagi mulai membaiknya situasi dan menurunnya kasus Covid-19 di China serta beberapa negara di Eropa merupakan sinyal positif bagi dunia maupun Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah bukan tanpa upaya dalam menanggapi prediksi Bank Dunia. Presiden Joko Widodo bahkan meminta jajarannya menggenjot belanja pemerintah lantaran investasi tak lagi bisa diandalkan. Dalam prediksi Kementerian Keuangan selama Januari hingga Juli 2020, investasi minus 3,4% hingga 1,1% dan konsumsi pemerintah masih positif 2,7%-3,7%. Masalahnya kontribusi belanja pemerintah cukup kecil 8,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan investasi hanya 32,3% dari PDB. Keadaan diperburuk dengan ekspor yang diproyeksikan minus 12,8% hingga minus 10,2% dari porsi 18,4%. Lalu impor minus 17% hingga minus 13,8%, dari porsi 18,9%. Sedangkan konsumsi yang jadi andalan hanya tumbuh 0,1%-1,5% dari porsi 57,9%.

Saat ini syarat terjadinya resesi hampir terpenuhi, pada kuartal 1 (Januari-Maret) dan kuartal 2 (April-Juni) telah terjadi pertumbuhan minus. Hasil kuartal 3 (Juli-September) akan menentukan apakah Indonesia terjerembab ke jurang resesi atau justru bisa selamat. Semua bergantung pada upaya pemerintah Indonesia.

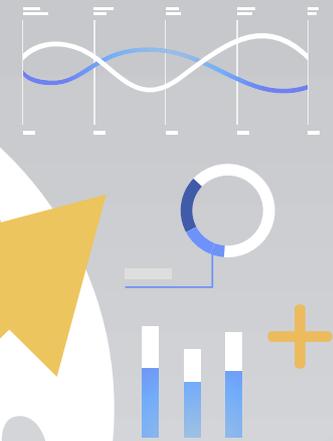
Terlepas dari prediksi Bank Dunia mengenai Indonesia yang terancam resesi. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Hidayat Amir optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap berada dalam skenario pemerintah yaitu 2,3% hingga minus 0%. "Bank Dunia menaruh situasi skenario pertumbuhan Indonesia *full year* 0%, tapi kami di Kemenkeu memprediksikan akan tetap tumbuh di kisaran 2,3% sampai minus 0,4%," papar Hidayat.



## Reksa Dana Syariah Berpotensi Tumbuh di Tengah Pandemi

Pangsa pasar reksa dana syariah terhadap industri reksa dana nasional terus meningkat. Berdasarkan data OJK, pada Juni 2020, *market share* dana kelolaan reksa dana syariah mencapai 12,03% terhadap total dana kelolaan industri reksa dana nasional.

Di tengah pandemi yang belum juga usai, roda perekonomian harus tetap berjalan. Apalagi masyarakat butuh pemasukan untuk memenuhi pengeluaran yang semakin hari semakin meningkat. Salah satu caranya adalah dengan berinvestasi. Salah satu



“  
**Masih  
 dibutuhkan  
 edukasi  
 masif kepada  
 masyarakat  
 Muslim terkait  
 keunggulan  
 prinsip  
 investasi  
 syariah**  
 ”

investasi reksa dana syariah ini.

Pertumbuhannya pun juga tidak main-main. Praktisi dan dosen pasar modal dari Universitas Islam Nusantara (Uninus), Yoyok Prasetyo mengungkapkan, tren investasi syariah memang terus tumbuh dari 1% kini menjadi 4,8%. “Artinya, setiap tahun investasi syariah ini terus tumbuh,” ujar Yoyok.

Bahkan di tengah pandemi sekalipun, data OJK mencatat dana kelolaan atau nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana syariah per awal Agustus 2020 mencapai Rp67,02 triliun, padahal akhir Desember 2019 hanya sebesar Rp53,73 triliun. Adapun secara persentase terhadap total NAB secara industri, per akhir Maret 2020 reksa dana syariah berkontribusi 12,15%, sedangkan per akhir Desember 2019 masih 9,91%. Dari sisi kinerja, rata-rata produk reksa dana syariah membukukan kinerja yang lebih baik dibandingkan produk reksa dana konvensional.

Dalam jangka panjang, Yoyok optimistis instrumen investasi syariah bisa bersaing walaupun secara umum butuh waktu. “Masih dibutuhkan edukasi masif kepada masyarakat Muslim terkait keunggulan prinsip investasi syariah,” ujarnya. Optimisme tersebut didukung dengan kondisi saat ini yang sudah serba digital. Sehingga edukasi produk-produk reksa dana syariah juga jauh lebih mudah diakses dengan tampilan informasi yang mudah dicerna semua kalangan.

“Kalau sudah *well educated* boleh lah dia naik kelas, tidak menempatkan dananya di reksa dana syariah tapi lebih dari itu ke saham syariah,” lanjut Yoyok.

Menilik sejarah perkembangan pasar modal dan reksa dana syariah, dapat diperkirakan ke depannya akan makin banyak produk yang dapat dipilih investor. Ditambah lagi jenis investasi ini tergolong aman dan mudah sekalipun untuk para investor pemula.

investasi ini. Dalam 5 tahun terakhir ini perkembangan dana kelolaan reksa dana syariah naik hampir 5 kali lipat, dari Rp11 triliun di 2015 menjadi Rp58 triliun pada Juni 2020.

Luasnya pangsa pasar produk reksa dana syariah terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Penduduk Indonesia sekitar 65%-70% yang merupakan usia produktif paling banyak menghasilkan dan membelanjakan uang. Dari jumlah penduduk produktif itu misalnya 80% merupakan penduduk Muslim, lalu 50% di antaranya paham reksa dana syariah, maka itulah potensi perkembangan reksa dana syariah.

Meskipun mengedepankan pengelolaan sesuai syariat Islam sebagai arahan investasi, bukan berarti reksa dana ini eksklusif bagi kaum Muslim saja. Bagi investor non muslim pun reksa dana ini dapat dipandang sebagai alternatif produk investasi. Maka semakin luas lagi pangsa pasar

di antara alternatif investasi ditawarkan adalah investasi syariah yang terdiri dari saham syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah, dan tabungan syariah.

Jenis investasi yang diprediksi bakal bertumbuh positif adalah reksa dana syariah. Reksa dana syariah pada dasarnya ialah reksa dana yang pengelolaannya sesuai dengan hukum syariat Islam. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia menjadi sangat potensial untuk mengembangkan instrumen

# Menjaga Aset Selama Pandemi Kunci Utama Menjaga Likuiditas

MEMASUKI KUARTAL II/2020 INDUSTRI PERBANKAN KEMBALI MENJADI SOROTAN. PANDEMI COVID-19 YANG TAK KUNJUNG REDA MEMICU KEKHAWATIRAN LONJAKAN KREDIT MACET YANG DAPAT MENGGANGGU KINERJA PERBANKAN KARENA BANYAKNYA UMKM YANG PERLU DIRESTRUKTURISASI/RELAKSASI KREDIT.





# INVESTMENT

Berdasarkan data biro riset Infobank, risiko kredit bank pada April 2020 meningkat ke 2,89% secara *gross*, sedangkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menurun ke 91,55%. Menurut Ekonom Ryan Kiryanto, ada dua cara yang bisa dilakukan bank untuk menjaga kecukupan modalnya, bisa lewat suntik modal langsung dari pemegang saham pengendali dan bisa juga dengan tidak membagikan dividen.

“Perbankan harus ‘lari marathon’ dalam jangka panjang ini untuk bertahan. Sampai kita benar-benar tahu kapan produksi vaksin dan pendistribusiannya,” ujarnya pada diskusi Infobank Talk News Juli lalu.

Bank Indonesia juga telah mengeluarkan *quantitative easing* atau kebijakan pelonggaran moneter, sehingga bank-bank bisa bergerak lebih leluasa, tutur Ryan.

Menurutnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) industri turun dari 23% ke level 21% hingga Maret 2020. Hal ini mengindikasikan bank-bank telah mengeluarkan dana pencadangannya.

Industri perbankan tidak hanya harus menjaga kualitas asetnya, melainkan juga harus menjaga likuiditasnya, sehingga bank-bank perlu menjaga kecukupan modalnya. “Likuiditas itu ibarat darah. Di situ ada vitamin, nutrisi dan sebagainya. Jika likuiditas bank kering bisa berbahaya,” ujar Ryan.

Menurut ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah, pemerintah juga mempunyai niat baik dalam menjaga pemenuhan likuiditas bank dengan cara menempatkan dana baik melalui Bank Jangkar maupun Bank Mitra. Hal ini didorong oleh keinginan pemerintah membantu dunia usaha dan perbankan dalam menambah likuiditas.

Saat ini, ujar Piter, koordinasi antara pemerintah dan otoritas keuangan terus diperkuat untuk menjaga likuiditas bank. Langkah ini merupakan bagian dari program pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

Berdasarkan data OJK pada 10 Agustus 2020, 100 bank telah

menjalankan restrukturisasi kredit pada 7,18 juta debitur dengan nilai *outstanding* Rp837,64 triliun. Melihat hal ini, perbankan butuh tambahan modal besar guna menjaga posisi likuiditasnya. Jika perlu kepemilikan saham pihak asing pada suatu bank dapat ditambah, asalkan kinerja bank bisa terangkat dan kembali kencang dengan setoran modal.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK, Anung Herlianto, menyampaikan, saat ini peran serta komitmen kepemilikan modal perbankan nasional sangat dibutuhkan. Menurutnya, pemilik modal baik asing maupun dalam negeri harus senantiasa berkomitmen menjaga kesehatan bank.

“Kita memonitor dua risiko ini saja, yakni risiko likuiditas dan risiko kredit. Selain itu juga dibutuhkan perlindungan yang cukup memadai dari sisi CAR. Peran pemilik modal sangat diperlukan dalam kondisi krisis saat ini,” ujar Anung.

# Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Global

**Hingga kini dampak Covid-19 masih dirasakan pada beberapa sektor perekonomian global. Sejumlah lembaga survei mencatat perekonomian dunia turun hingga di bawah rata-rata.**

Pandemi Covid-19 benar-benar mempengaruhi perekonomian global. Kebijakan *lockdown* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan banyak negara untuk mencegah semakin luasnya penyebaran virus ini nyaris melumpuhkan sendi-sendi perekonomian global. Industri penerbangan, perjalanan, dan pariwisata praktis lumpuh. Sekolah dan pertokoan terpaksa ditutup untuk jangka waktu yang cukup panjang.

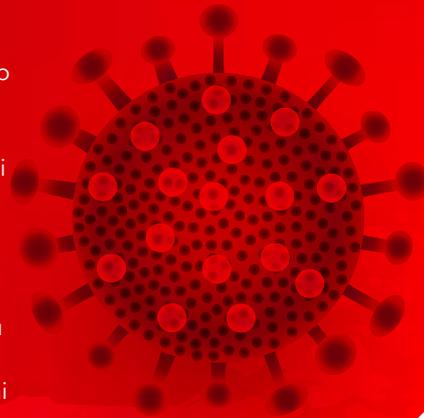
Kini, seiring dengan kebijakan kenormalan baru (*new normal*) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, ditambah gelontoran insentif keuangan dan perbankan serta pelonggaran (relaksasi) kredit, sebagian kegiatan ekonomi telah kembali menggeliat, meski terlihat lesu darah.

Menelaah bagaimana sektor perekonomian akan berjalan, sangat menarik untuk diketahui bagaimana beberapa negara tetap *sustainable* selama pandemi berlangsung. Dalam webinar bertemakan 'Global Economy and Financial Sector Post Covid-19' yang diselenggarakan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan Pusat Unggulan Iptek (PUI) UNS Fintech Centre 6 Juli lalu, dampak

pandemi Covid-19 terhadap perekonomian global dan sektor finansial dibahas belasan pakar dari berbagai negara.

Sebagai pembicara utama tampil Ketua Dewan Komisiner OJK Prof. Wimboh Santoso. Selain itu tampil sepuluh pembicara dari beberapa negara, yakni Sergio L. Schmukler, Ph.D (*Lead Economist, World Bank*), Prof. Franco Fiordelisi (*University of Rome III, Italy/University Essex, UK*), Dr. Emma Allen (*Country Specialist, Asian Development Bank*), dan Prof. Alistair Milne (*Loughborough University, UK*), Prof. Amine Tarazi (*University of Limoges, France*), Prof. John Williams (*Bangor University, UK*), Prof. Robin Luo Ph.D., FRM (*Xihua University, China*), Prof. Mehmet Huseyin Bilgin (*Istanbul Medeniyet University, Turkey*), Zenu Sharma, Ph.D (*St. John's University, USA*), dan Dr. Irwan Trinugroho (Universitas Sebelas Maret, Indonesia).

Wimboh Santoso menyampaikan, perekonomian dunia amat terdampak pandemi Covid-19. Sejumlah lembaga survei mencatat perekonomian dunia turun hingga di bawah rata-rata.



“Tidak penting membahas dampak pertumbuhan ekonomi ini, namun yang lebih penting bagaimana mengurangi dampaknya,” kata Wimboh.

Menurut Wimboh, setiap negara memiliki cara yang berbeda untuk mengelola bidang keuangannya karena perbedaan kondisi faktor yang mempengaruhi. Ia menambahkan, di kuartal pertama kondisi perekonomian Indonesia menurun, dan masih berlanjut pada kuartal kedua. Namun Wimboh optimis pada akhir tahun ini kondisi ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan yang positif. Permintaan domestik menjadi salah satu kunci pertumbuhan ini bisa berjalan dengan baik.

Merangkum para pembicara lainnya, beberapa sektor ekonomi global mengalami penurunan, terutama sektor finansial yang mengalami masalah di hampir 31 negara yang terdampak pandemi. Para pakar menyebutkan kawasan Asia yang

sangat terdampak dan diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir 2020, dan prediksi baru akan bangkit kembali pada 2021 sebesar 0,1%. Selanjutnya yang juga turun signifikan adalah sektor keuangan di Inggris: industri perbankan, *fintech*, dan asuransi.

Agar tetap dapat beroperasi di tengah bencana ini, para pakar menyarankan perusahaan-perusahaan, termasuk industri perbankan, memperkuat digitalisasi. Dengan cara ini bank-bank tetap dapat beroperasi dengan mematuhi *social distancing* dan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.



# Era *New Normal* Kinerja Pasar Modal Pulih

Geliat pasar saham diyakini akan menunjukkan tren positif memasuki masa kenormalan baru (*new normal*). Kinerja saham akan membaik sejalan dengan pemulihan bertahap di berbagai sektor bisnis. Kondisi ini akan menjadi peluang bagi para investor untuk membeli saham pada harga murah.

Memasuki era *new normal* di pertengahan 2020 pandemi Covid-19 masih menjadi tema utama perbincangan di berbagai sektor. Di pasar modal Indonesia, peristiwa ini turut direspon para investor dalam menentukan keputusan arah investasi.

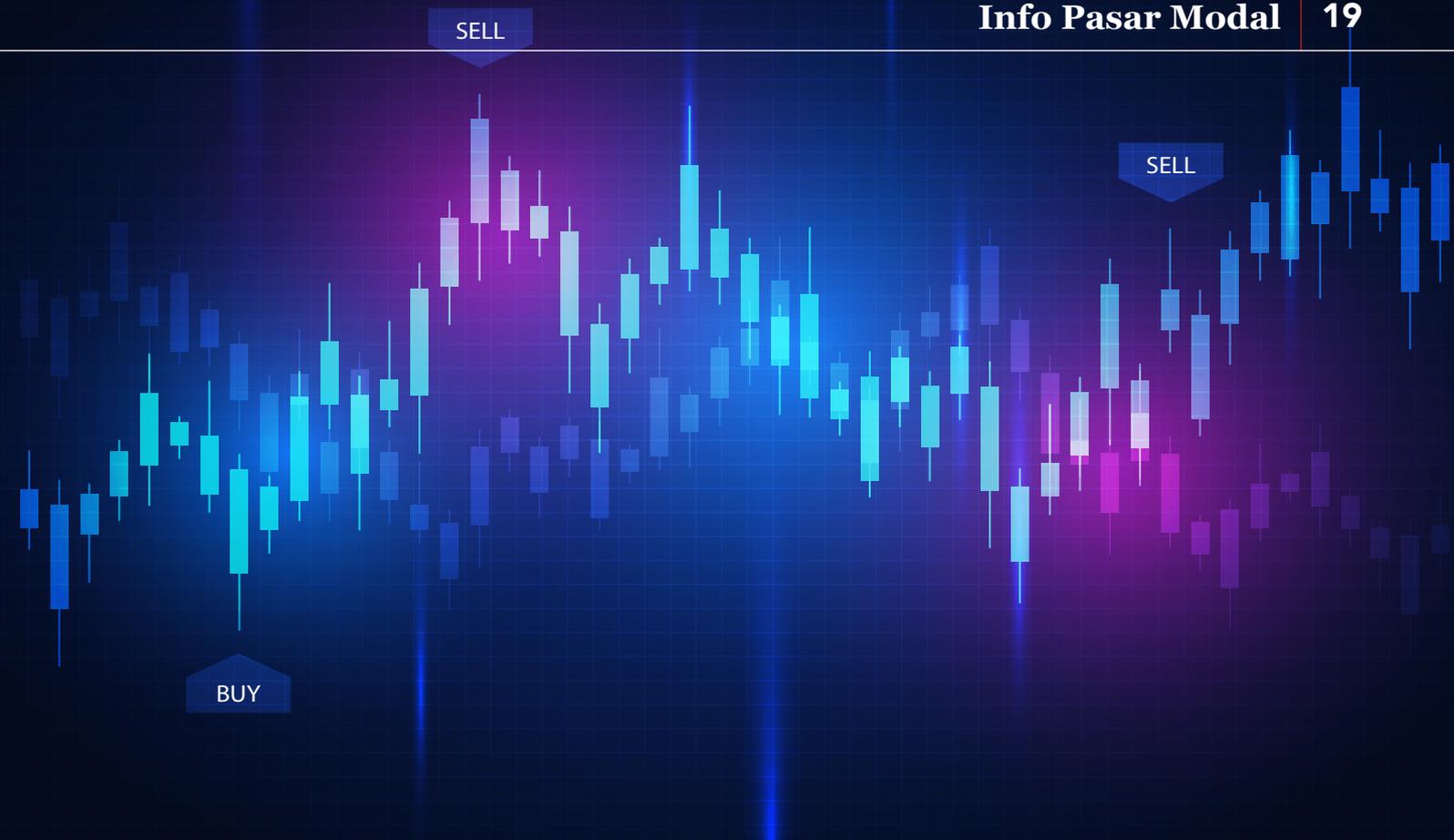
Presiden Direktur Sucor Asset Management Jemmy Paul Wawointana menyampaikan bahwa ekonomi secara

global akan pulih secara bertahap atau membentuk kurva U dimulai pada kuartal ketiga ini. Pasar modal, sebagai salah satu indikator ekonomi, diperkirakan bisa bergerak lebih awal karena mengikuti perubahan pandangan dan ekspektasi pada pertumbuhan ekonomi dan bisnis ke depannya.

"Kami masih optimistis fundamental ekonomi Indonesia

cukup baik dan dari sisi pasar saham Indonesia menawarkan potensi imbal hasil cukup menarik bagi investor asing di mana PER (*Price to Earning Ratio*) rata-rata saat ini cukup murah di level 12,4 per 10 Juli 2020, ditambah komitmen Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan moneter dan mata uang rupiah," ujar Jemmy.

Saat ini hampir seluruh kinerja indeks Bursa Global mengalami penurunan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 21,13% di level 4.905 pada 30 Juni 2020, dibanding akhir tahun 2019. Pada umumnya, seluruh indeks sektoral turun secara



year to date. Namun kenaikan terlihat pada awal Agustus 2020 di posisi 5.134 poin.

“Sektor yang turun paling dalam selama tahun 2020 adalah sektor properti dan *real estate* sebesar 36,09%. Di sisi lain, sektor *consumer goods* menunjukkan kinerja indeks yang relatif baik dibandingkan indeks acuannya (IHSG dan LQ45). Bahkan, sektor *consumer goods* mampu mencatatkan kinerja positif sejak adanya pengumuman kasus Covid-19 pertama di Indonesia,” kata Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Pintor Nasution.

Namun, sisi positifnya, aktivitas perdagangan justru terus meningkat. Rata-rata frekuensi perdagangan meningkat 9,64% menjadi 514 ribu kali per hari dengan rata-rata total nilai transaksi dan volume transaksi masing-masing sebesar Rp7,67 triliun dan 7,63 miliar lembar per hari.

“Dari sisi investor pasar modal, sampai dengan Juli 2020 jumlah investor tumbuh 17,8% menjadi 3,02 juta investor, yang terdiri dari investor saham, reksa dana, dan obligasi, dibandingkan akhir tahun lalu,” paparnya. Tren positif tersebut, lanjut Pintor, karena dalam 4 tahun terakhir pasar modal Indonesia mulai didominasi investor muda dan milenial usia 18-30 tahun. Terlebih lagi, peningkatan aktivitas transaksi juga dipengaruhi oleh rangkaian kebijakan pemerintah dan otoritas keuangan dalam melakukan stabilisasi kondisi perekonomian dalam negeri. Jadi, meski masih dibayangi pandemi, minat perusahaan untuk masuk ke pasar modal tidak surut.

Pertumbuhan aktivitas investor ritel dalam tiga bulan terakhir pun melonjak, rata-rata naik lebih dari 50% (periode April -Juni 2020) dibandingkan di periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dari sisi

jumlah produk berbasis *local index*, pertumbuhan *Exchange Traded Fund* (ETF) yang eksponensial membuat Indonesia menduduki peringkat pertama di ASEAN, seiring dengan pertumbuhannya yang signifikan sejak 2018.

Presiden Direktur Schroder Investment Management, Michael Tjoajadi, juga mengatakan hal yang senada. Menurutnya, dalam tatanan normal baru, beberapa saham masih punya peluang tumbuh, misalnya saham emiten di sektor telekomunikasi dan kesehatan (rumah sakit dan farmasi). Optimisme Michael bahkan sangat jauh ke depan hingga memasuki 2021. “Tahun depan, ekonomi dunia termasuk Indonesia, *confidence* perekonomian akan balik lagi bahkan lebih kuat dari sebelumnya, kurang lebih tumbuh 6,8%-7% setelah turun pada 2020. Ada harapan di situ,” begitu Michael memprediksikan.

# OJK Jaga Kestabilan BPR dengan Apex

**Pandemi Covid-19 mengganggu stabilitas industri perbankan, lebih-lebih Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kesulitan menghadapi kredit macet. Untuk itu OJK memberikan inovasi dengan menghadirkan Apex.**

Untuk memperkuat fondasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang terdampak pengaruh Covid-19, OJK terus memperkuat fondasi BPR. Hal ini diungkap Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah dalam webinar yang diadakan LPS pada Juni lalu.

“OJK terus memperkuat fondasi BPR dengan membuat Apex,” ungkap Halim dalam webinar “New Normal dan Mitigasi Bisnis Perbankan Saat Wabah Covid-19”. Apex berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengayom. Apex BPR adalah bank yang ditunjuk sebagai pengayom sejumlah BPR. Fungsi lembaga Apex dititikberatkan kepada

peran pengumpulan dana (*pooling of fund*), selain untuk memberikan bantuan keuangan dan dukungan teknis.

Hadirnya Apex sangat membantu bank yang sedang tidak stabil. Secara teknis Apex akan memberikan bantuan dana menjadi *cooling five*. Anggota BPR bisa memberikan Apex dengan kontribusi dan iuran. Hal tersebut menurut Halim sudah berlaku di beberapa bank daerah, yang sudah memiliki banyak BPR di dalamnya.

Tidak hanya di beberapa bank daerah, bank swasta pun sudah menjalin kerja sama dengan Apex bank. Sehingga, OJK bisa mengetahui dan mengarahkan bank untuk melakukan merger dan konsolidasi.

Menurut Halim pada masa pandemi Covid-19 ini LPS telah menurunkan Tingkat Bunga Pinjaman (TBP) sebanyak tiga kali, yakni pada Januari, Maret, dan Mei 2020. Hingga akhir bulan Mei total kumulatif penurunan sebesar 75 bps untuk rupiah dan 25 bps untuk valas terhadap posisi akhir Desember 2019.

“Saat ini TBP Bank Umum untuk rupiah dan valas sebesar 5,5% dan 1,5%. Sedangkan TBP untuk BPR sebesar 8%,” kata Halim.

LPS juga menurunkan denda keterlambatan premi menjadi 0% yang mulai berlaku pada Juli hingga akhir tahun 2020. Sementara itu, peran LPS dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Covid-19 disesuaikan dengan PP Nomor 23 tahun 2020, yakni bila Bank Peserta mengalami permasalahan dan diserahkan penanganannya kepada LPS, LPS akan mengutamakan pengembalian dana pemerintah.



# Waspada! Informasi Hoax Ajakan Menarik Dana di Bank

OJK menghimbau masyarakat berhati-hati terhadap informasi *hoax* di berbagai platform media sosial yang mengajak untuk menarik dana di bank. Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo, menyampaikan informasi yang beredar tersebut adalah berita bohong (*hoax*).

“OJK telah melaporkan informasi *hoax* ini kepada Bareskrim Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk diusut dan ditindak sesuai ketentuan karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat,” kata Anto, Juli lalu.

Berdasarkan sumber data OJK pada Mei 2020, tingkat permodalan dan likuiditas perbankan masih dalam kondisi yang aman. Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan sebesar 22,16% atau di atas ketentuan, sementara hingga 17 Juni rasio alat likuid *non-core* deposit dan alat likuid Dana Pihak Ketiga (DPK) terpantau pada level 123,2% dan 26,2%, jauh di atas ambang batas (*threshold*) masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Terhitung sampai Juli 2020, Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK Anung Herlianto menjelaskan per Mei 2020 total Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tetap tumbuh sebesar 8,87% kendati laju kredit terpantau melambat atau hanya naik 3,04% *year on year* (y.o.y.). Data likuiditas perbankan lainnya juga masih aman, salah satunya posisi *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) masih sebesar 209,78% jauh di atas batas bawah 100% yang ditetapkan oleh regulator.

OJK menghimbau masyarakat untuk lebih dulu mencari tahu kebenaran informasi tersebut dan tetap berhati-hati menerima informasi berbau keuangan.

OJK juga sudah membuat kontak untuk menerima aduan untuk memvalidasi informasi terkait masalah keuangan dengan menghubungi Kontak OJK di nomor 157, layanan *Whatsapp* resmi 081157157157, atau media sosial seperti *Instagram* dan *Facebook* di @Kontak157.



# Prospek Industri Dana Pensiun Memasuki Era *New Normal*



**Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian negara, antara lain menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang turut berpengaruh terhadap bisnis Dana Pensiun (Dapen). Lalu bagaimana prospek industri ini ke depannya?**

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) mencatat wabah Corona menyebabkan pemasaran produk DPLK sejumlah emiten mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pemasaran produk DPLK tidak dapat berjalan seperti sebelum pandemi. Ketua Umum Asosiasi DPLK Nur Hasan Kurniawan mengatakan, kebijakan *work from home* (WFH) amat memengaruhi pemasaran produk DPLK.

Bahkan, pertumbuhannya pun menurun cukup signifikan. Kuartal pertama 2020 tercatat senilai Rp13,8 triliun, dibandingkan akhir 2019 total investasi industri dapen senilai Rp15,16 triliun, turun 8,9% (ytd) dari posisi

Desember 2019. Hal ini terkait dengan banyaknya jumlah pekerja yang di-PHK sehingga memaksa mereka menarik lebih awal tabungan pensiunnya di DPLK. "Pertumbuhan ekonomi yang menurun akan berdampak pada pertumbuhan Dapen, terlebih dengan adanya PHK besar-besaran sehingga memaksa pekerja mengambil tabungan pensiunnya di DPLK," kata Nur Hasan.

Hal ini mengakibatkan perusahaan kesulitan membayar nilai total pesangon yang besar kepada karyawan yang telah bekerja belasan hingga puluhan tahun. Namun fenomena PHK di tengah pandemi

dan merosotnya penjualan produk Dapen tidak berlangsung lama. Seiring membaiknya kondisi perekonomian ketika pemerintah mulai melonggarkan aturan PSBB, geliat bisnis Dapen mulai bangkit.

"Dengan adanya *new normal*, DPLK optimistis bisa kembali memasarkan produknya. Pelonggaran PSBB bisa memberikan dampak positif terhadap DPLK. Namun, kami enggan terburu-buru karena perekonomian baru saja di mulai setelah sebelumnya sempat terhenti," ujar Nur Hasan.

Optimisme tersebut bukan tanpa dasar. Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan

(DPLK) Syarif Yunus menjelaskan, pada 2008 saat gejolak perekonomian melanda Indonesia, terjadi perubahan cukup signifikan pada industri DPLK. Menurutnya, gelombang PHK menyadarkan dunia usaha bahwa pembayaran pesangon menjadi beban besar yang kerap sulit terpenuhi.

“Sejak saat itu dan ditambah sejak ada DPLK Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) pada 2013, aset yang dikelola industri DPLK terus bertumbuh 20%–30%,” ujar Syarif. Menurut Syarif, hal tersebut membuat para pelaku usaha menyadari pentingnya kepesertaan DPLK karena pekerja pasti akan memasuki masa pensiun, dan dalam kondisi darurat mungkin terjadi PHK.

Syarif menjelaskan bahwa kondisi pandemi Covid-19 setidaknya akan memberikan dua gambaran kepesertaan DPLK bagi para pemberi kerja. Pertama, perusahaan yang terganggu bisnisnya tidak akan memprioritaskan keikutsertaannya di DPLK untuk mengantisipasi kondisi yang sama terjadi kembali.

Kedua, perusahaan yang kondisi bisnisnya relatif normal semestinya menyadari untuk menyiapkan program DPLK bagi para pekerjanya. Besarnya gelombang PHK perlu dilihat oleh para pemberi kerja sebagai risiko, karena kewajiban membayar pesangon akan sangat memengaruhi arus kas perusahaan.

“Ada tantangan yang tidak mudah di masa pandemi ini untuk menambah kepesertaan DPLK, tapi ini juga jadi momentum untuk edukasi pasar terkait pentingnya menyiapkan program DPLK, baik untuk pemberi kerja maupun pekerja,” ujar Syarif.

Karena itulah DPLK perlu memperkuat sinergi dengan jaringan internal korporasi dan eksternal untuk menjaga kinerja bisnis di tengah pandemi virus Corona. Menurut Direktur Eksekutif DPLK Muamalat, Lilies Sulistyowati, DPLK bisa memaksimalkan jaringan internal di perbankan atau asuransi jiwa, misalnya dengan menggarap peserta di anak-anak usaha korporasinya. Selain dapat

meningkatkan kinerja DPLK, hal itu pun dinilai akan mendorong kualitas manfaat pensiun korporasi.

Lebih lanjut Lilies menilai DPLK perlu memperkuat sinergi dengan pihak eksternal, seperti jaringan nasabah atau grup korporasinya. Kondisi pandemi dinilai sebagai momentum yang tepat untuk mengedukasi manfaat DPLK bagi pengelolaan keuangan perusahaan.

“DPLK harus membuat inovasi pengembangan produk dan layanan untuk kemudahan akses peserta,” ujarnya. Tentu, upaya-upaya tersebut dapat mendorong pertumbuhan industri ini di era *new normal*.





# Strategi OJK Mengakselerasi Relaksasi Kredit Lembaga Pembiayaan

Untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional, khususnya Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) sektor pembiayaan, OJK mendatangi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah untuk mendapatkan informasi dari pelaku UMKM mengenai kondisi ekonomi dan identifikasi percepatan akses stimulus.

Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan upaya penyelamatan para pelaku UMKM di Indonesia akibat dampak dari pandemi COVID-19. Menindaklanjuti hal tersebut, pada pertengahan Maret lalu OJK mengeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19 yang merupakan stimulus berupa pelonggaran penilaian kualitas kredit dan proses restrukturisasi kredit di lembaga pembiayaan.

Pasca dikeluarkannya kebijakan, hingga 28 Juli 2020, OJK mencatat 183 perusahaan pembiayaan sudah menjalankan restrukturisasi pinjaman tersebut. Realisasinya, dari 4,74 juta kontrak permohonan restrukturisasi yang diterima perusahaan pembiayaan, sudah disetujui sebanyak 4,10 juta dengan total nilai Rp151,1 triliun. Sementara untuk sektor lembaga keuangan mikro per Mei 2020 total nilainya sebesar Rp9,7 miliar.

Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo mengatakan kebijakan ini dikeluarkan

guna menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan menempatkan industri jasa keuangan menjadi katalis dalam menggerakkan roda perekonomian. "Kebijakan restrukturisasi ini berhasil menahan laju kenaikan kredit macet (*NPL*) dan mengurangi tekanan permodalan sehingga stabilitas sektor jasa keuangan dapat terjaga dengan baik," katanya.

Sejauh ini kebijakan tersebut mampu menahan kenaikan Non-Performing Financing (NPF) perusahaan pembiayaan. Rasio NPF industri pembiayaan mencapai 5,1% pada Juni 2020. Angka itu menjadi catatan NPF tertinggi selama lima tahun terakhir. Sebelumnya, nilai tertinggi pernah terjadi pada Mei 2017 sebesar 3,45%, kemudian pada Mei 2011 4,11%.

"Kenaikan rasio NPF itu sudah cukup tertahan oleh adanya Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020. Beleid itu termasuk mengatur relaksasi kredit perusahaan pembiayaan," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Menurut Wimboh, OJK sedang mempertimbangkan perpanjangan relaksasi itu jika masih terdapat debitur yang kesulitan membayar cicilannya setelah masa aturan tersebut berakhir, yakni pada 31 Maret 2021. Meskipun OJK berharap dampak pandemi segera mereda, langkah perpanjangan itu tetap dipertimbangkan.

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang paling terimbas efek pandemi Covid-19 merupakan pihak yang paling dikhususkan untuk mendapat relaksasi kredit sesuai POJK tersebut. Jaminan kredit untuk UMKM dinilai dapat mendorong pertumbuhan kredit

perbankan. Hasilnya, percepatan pemulihan ekonomi nasional bisa segera terwujud.

Karena itulah pasca dikeluarkannya POJK tersebut OJK terus memantau keefektifannya agar akselerasi lembaga pembiayaan terlaksana. Salah satu upaya riil yang dilakukan OJK adalah meninjau langsung pelaku UMKM di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

Bandung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang masuk agenda OJK untuk dipantau perkembangan akselerasi kebijakan restrukturisasi kredit UMKM. Wilayah lain adalah Tegal, Solo, dan Semarang. Langkah ini dinilai efektif untuk menilai penerapan program jaminan kredit modal usaha tepat sasaran atau tidak.

"Pola komunikasi yang positif ini sangat kami sambut baik, karena kita merasa langsung ada monitoring di lapangan dan tinjauan ulang dari pemerintah dalam hal ini OJK," kata Wakil Ketua Kadin Jawa Barat merangkap Ketua REI DPD Jawa Barat Joko Suranto yang wilayah tugasnya disambangi tim OJK.

Sebelumnya, berbagai kebijakan stimulus telah dikeluarkan OJK di masa pandemi sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. OJK sudah mengeluarkan 11 kebijakan stimulus di industri perbankan, pasar modal dan IKNB. Kebijakan stimulus tersebut selain untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan juga berfungsi untuk menempatkan industri jasa keuangan menjadi katalis dalam menggerakkan roda perekonomian dengan memberikan daya dukung bagi sektor riil.

# Kebijakan Stimulus OJK selama Pandemi

Sampai memasuki masa *New Normal*, OJK sudah mengeluarkan beberapa kebijakan stimulus di industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Kebijakan ini di ambil untuk menjaga stabilitas industri jasa keuangan dan membantu pemulihan ekonomi nasional serta meringankan beban masyarakat.

Selain merilis kebijakan stimulus, OJK juga mendukung langkah pemerintah untuk percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). OJK bersama Kementerian Keuangan telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait PMK 64/2020 dan PMK 65/2020.

OJK juga menyampaikan data calon bank peserta dan data calon debitur penerima subsidi bunga kepada Kementerian Keuangan berdasarkan data OJK di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Berikut kebijakan stimulus yang telah dirilis OJK:

- Kebijakan stimulus perbankan yang sebenarnya merupakan *countercyclical* dampak dari Covid-19, di mana dalam kebijakan untuk perbankan guna mengatur relaksasi atas restrukturisasi kredit kepada debitur Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdampak penyebaran Covid-19.
- Untuk kebijakan stimulus pasar modal, pelaksanaan pembelian kembali saham (*buyback*) harus sesuai dengan POJK Nomor 2/POJK.04/2013. Selain itu Rapat umum Pemegang Saham

(RUPS) dilakukan secara elektronik menjadi e-RUPS sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya OJK meminta ada prinsip keterbukaan di pasar modal bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan lembaga jasa keuangan untuk mencegah dan menangani krisis sistem keuangan serta menciptakan stabilitas sistem keuangan.

- Untuk industri keuangan non-bank (IKNB), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) meminta IKNB memberikan keringanan bagi para debitur khususnya Perusahaan Pembiayaan dengan nilai di bawah Rp10 miliar.

OJK juga mengeluarkan POJK yang berlaku bagi semua sektor jasa keuangan di masa pandemi Covid-19 yaitu POJK Nomor 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan pada 2 Juni 2020.

POJK ini menetapkan pemberian relaksasi kepada para pelaku industri jasa keuangan di seluruh Indonesia atas keterlambatan pembayaran sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga dalam keadaan tertentu darurat bencana akibat penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia.

